

Danrem 161/Wira Sakti Terima Tim Wasbinsat Siapops Sopsad



Kupang,Mwartapedia.com – Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya menerima Ketua Tim Wasbinsat Siapops (Pengawasan Pembinaan Satuan Kesiapan Operasi) Sopsad Brigjen TNI Rifki, S.E.,M.M.

Mendampingi Danrem 161/Wira Sakti dalam kegiatan ini adalah Kasrem 161/Wira Sakti dan Para Kasi Kasrem 161/Wira Sakti, Selasa (16/03/2021) di Loby Makorem 161/Wira Sakti.

Usai beberapa saat di loby Makorem 161/Wira Sakti, Ketua Tim Wasbinsat menerima Paparan Singkat Pembinaan Satuan Korem 161/Wira Sakti yang disampaikan oleh Kasiter Kasrem 161/Wira Sakti Kolonel Inf Seniman Zega selaku Plh Kasiops Kasrem 161/Wira Sakti.

Dalam paparan tersebut disampaikan tentang enam komponen pembinaan satuan (Binsat) yaitu bidang organisasi, bidang personel, bidang materiil, bidang pangkalan, bidang piranti lunak dan bidang latihan.

Atas paparan tersebut Ketua Tim Wasbinsat Siapops Sopsad memberikan petunjuk dan arahan tentang enam komponen pembinaan satuan (Binsat) Korem 161/Wira Sakti.

Usai pengarahan dan petunjuk dari Ketua Tim Wasbinsat Siapops, selanjutnya dilaksanakan sesi tanya jawab.

Hadir dalam kegiatan paparan ini Kasrem 161/Wira Sakti, Para Kasi Kasrem 161/Wira Sakti dan Para Danka Balak Aju Kodam IX/Udayana. (penrem161ws)

Bank Artha Graha Kupang Hadir dan Tawarkan Konsep Baru, Kenyamanan Transaksi Perbankan



[Kupang, Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Sektor perbankan di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan kearah digital yang ditandai dengan menjamurnya platform payment gateway. Hal ini untuk memberikan kenyamanan bagi nasabahnya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutan dalam grand Opening Kantor Bank Artha Graha Internasional Cabang kupang mengatakan sangat gembira dengan kehadiran Kantor Cabang Bank Artha Graha di NTT.

“Atas nama pemerintah daerah menyambut gembira dengan relokasi kantor cabang Bank Artha Graha, semoga dapat memberikan kontribusi yang bagi pertumbuhan ekonomi di NTT khususnya dimasa pandemi,”pinta Gubernur NTT, pada syukuran relokasi Kantor Bank Artha Graha Internasional Cabang Kupang Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kotaraja, Kupang, Selasa (16/3/2021).



Sementara itu, Pimpinan Bank Artha Graha Cabang Kupang, Nicolas Ferdyanto Tju, S.Kom menuturkan, kini Bank Artha Graha Internasional Cabang Kupang hadir dengan konsep yang baru dan lebih segar sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan mengusung konsep baru untuk menambah kenyamanan bertransaksi perbankan

Nicolas menyebutkan kantor cabang ini dilengkapi beragam fasilitas seperti semi coworking space dan wifi untuk menunjang aktivitas perbankan dari nasabah.

Menurutnya, konsep ini untuk meningkatkan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan kepada nasabah yang beragam fasilitas digital disediakan kepada nasabah yang bertransaksi.

“Dengan konsep baru ini menjadi sebuah pengalaman

baru agar nasabah lebih nyaman melakukan transaksi perbankan. Kami terus berkomitmen melayani nasabah dengan lebih baik khususnya di Kota Kupang," Ungkap Nicolas pada syukuran relokasi kantor.

Syukuran relokasi kantor cabang tetap dilakukan sesuai protokol kesehatan dan tamu undangan menyaksikan secara virtual melalui Conference Call. (ML)

Ketum AHY Silaturahmi ke Kediaman Jusuf Kalla



Jakarta, Mwartapedia.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) silaturahmi ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu (14/3) siang. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Ketum AHY dan Pak JK membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.

Ketum AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat. "Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk

bersilaturahmi. Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum,” jelas Ketum AHY. “Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia,” tambahnya.

“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” tandasnya.

Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting. “Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK. Namun ia mengingatkan untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.

Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.

Saat silaturahmi, Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution (csa)

Sumber: Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat

Webinar Nasional NTT Bangkit Menuju Zero Stunting



Kupang, [Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi MM mengatakan Pemerintah Provinsi NTT akan terus berupaya untuk menekan angka stunting sebagaimana untuk bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta juga guna menciptakan generasi penerus sebagai sumber daya manusia yang baik, berkualitas, dan unggul.

Hal tersebut disampaikannya pada saat menjadi Keynote Speaker dalam ‘Webinar Nasional Dalam Rangka Pengabdian Pada Masyarakat’ dengan topik ‘NTT Bangkit Menuju Zero Stunting’ yang diselenggarakan pada senin 15 maret 2020. Wakil Gubernur hadir dalam webinar tersebut bersama para Pejabat Eselon II Lingkup Pemprov NTT di ruang rapat Gubernur NTT.

“Menuju zero stunting ini adalah tantangan kita dalam menjawab masalah stunting itu sendiri. Ini adalah cita-cita dan tujuan kita bersama baik Pemerintah dan masyarakat agar saling bersinergi untuk mengatasi masalah stunting sesuai sasaran yang tepat. Kita semua bertekad untuk menuju zero stunting. Harus bisa tuntas,” demikian ditegaskan Wakil Gubernur.

“Saya membicarakan kaitkan visi dan misi Pemerintahan saat ini yaitu NTT bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam bingkai NKRI. Mengapa kita gunakan kata bangkit karena kondisi kita di

NTT yang masih tertinggal dan maka dari itu harus dibawa menuju kemajuan bersama dimana dengan pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat untuk penanganan stunting,” ujarnya.

Dijelaskannya sumber daya alam NTT ini sangat kaya dan juga sebagai aset. Aset jangan dibiarkan begitu saja melainkan harus dikelola dengan baik untuk menunjang kesejahteraan terutama dalam penanganan masalah stunting,” tambah Wakil Gubernur.

“Salah satu cara kami menekan stunting adalah dengan pengembangan tanaman kelor yang memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk dikonsumsi sehingga dapat mendukung asupan gizi bagi masyarakat yang terkena stunting,” ujar Wakil Gubernur.

Dijelaskannya saat ini, kelor NTT terus dikembangkan dengan diantaranya pengembangan kelor 50 juta pohon hingga tahun 2023, meningkatkan produksi dan mutu kelor, memperkuat pengembangan petani kelor, memfasilitasi kemitraan petani/produsen kelor dengan industri hilir agar tercipta rantai pasok yang berkelanjutan, mengembangkan kelor NTT untuk semakin dikenal luas di pasar domestik maupun mancanegara, menjadikan kelor sebagai komoditas unggulan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)

Dunia Medsos Tidak
Proporsional Menempatkan

Jusuf Kalla Dalam Kasus Tindak Pidana Perbankan Atas Nama Sadikin Aksa



Kupang, [Mwartapedia.com](https://www.mwartapedia.com) – Kita patut mengapresiasi langkah berani, terukur dan tanpa ragu sedikitpun dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, karena telah menetapkan Sadikin Aksa, Dirut PT. Bosowa Corporindo, keponakan Jusuf Kalla (JK) menjadi tersangka Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dalam kasus Tindak Pidana Perbankan pada Bank Bukopin.

Demikian rilis yang diterima dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H pada Senin (15/03/2021).

Selain daripada itu sikap pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga patut kita apresiasi karena telah memberikan akses dan dukungan penuh berupa informasi kepada Dittipideksus Bareskrim Polri dalam pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Perbankan dimaksud, sekalipun nanti ada oknum OJK yang bakal dijadikan tersangka.

Namun sangat disayangkan karena aksi publisitas dunia medsos itu telah melampaui bahkan sudah tidak proporsional dalam menempatkan nama JK seolah-olah menjadi pihak yang ikut

bertanggung jawab dalam kasus Tindak Pidana Perbankan yang melibatkan Sadikin Aksa, keponakan JK selaku Dirut PT. Bosowa Corporindo, pemegang saham Bukopin.

Pengungkapan kasus dugaan Tindak Pidana Perbankan oleh Dittipideksus Bareskrim Polri, mendadak menjadi trending bukan karena angka kerugian yang diderita Bank Bukopin, tetapi oleh karena tersangka yang diduga sebagai pelakunya adalah Sadikin Aksa, keponakan JK mantan Wakil Presiden yang selama ini dikenal sangat protektif terhadap bisnis keluarga dan kroninya.

Perlu Penyelidikan Aspek Korupsi

Jika Bareskrim Mabes Polri melakukan penyidikan hanya pada aspek Tindak Pidana Perbankan dengan melibatkan pihak OJK, maka KPK harus proaktif menyelidiki dari aspek Tindak Pidana Korupsi, mengingat Bank Bukopin adalah Bank plat merah. KPK tidak boleh hanya asyik pada aktivitas OTT atau hanya sekedar mensupervisi langkah Bareskrim.

KPK lebih baik segera melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan secara progresif dan simultan guna memastikan apakah ada dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau tidak dalam Tindak Pidana Perbankan tsb., mengingat Bank Bukopin merupakan Bank plat merah, yang disebut-sebut terdapat saham keluarga JK atas nama PT. Bosowa Corporindo.

Dengan demikian sangat beralasan hukum, jika KPK segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan apakah ada peristiwa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang di dalamnya pada Bank Bukopin dan apakah ada intervensi kekuasaan yang melibatkan JK selaku Wakil Presiden atau setidaknya terdapat praktek mendagangkan pengaruh jabatan JK selaku Wakil Presiden.

Korupsi Mendagangkan Pengaruh

Modus korupsi dengan mendagangkan pengaruh selalu masuk akal sehat, karena tipologi korupsi di Indonesia secara umum terjadi karena terdapat pihak-pihak yang senantiasa membawa nama seseorang dengan jabatan negara yang tinggi untuk mempengaruhi pejabat yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi Sadikin Aksa dkk. dalam PT. Bank Bukopin.

Karena itu langkah cepat dari KPK sangat diperlukan, mengingat JK merupakan tokoh bangsa dan seorang negarawan yang nama baiknya harus dijaga, karena pada waktu yang bersamaan di jagad medsos nama JK ditulis dengan akronim dan dengan meme bermacam-macam, memvonis keterlibatan JK dengan narasi memfitnah hingga melampaui batas adat ketimuran dan hukum positif.

Aparat penyidik Bareskrim Polri dan KPK karena kewajibannya dalam penyelidikan dan penyidikan, berwenang bertindak menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu sesuai dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, harus patut dan masuk akal, berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati HAM orang lain.

Oleh karena itu KPK dan Bareskrim harus proaktif mengklarifikasi secara berkala setiap hasil penyelidikan dan penyidikan serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, demi meluruskan informasi yang tanpa didukung fakta-fakta hukum dengan mengkait-kaitkan nama JK dalam dugaan Tindak Pidana Perbankan atau Tindak Pidana Korupsi dalam kasus PT. Bank Bukopin.(ML)